

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Financial distress atau kesulitan keuangan tidak hanya terjadi pada perusahaan, tapi juga di pemerintah daerah termasuk sektor publik. *Financial distress* dalam sektor publik merupakan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjalankan aktivitasnya seperti aktivitas operasi, hutang, infrastruktur, ataupun pembangunan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu daerah yang mengalami *financial distress* adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia atau pulau terbesar ketiga di Indonesia dengan luas mencapai 473.481 km² dan merupakan pulau yang memiliki provinsi terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 10 provinsi serta memiliki 154 kabupaten/kota. Pulau Sumatera sendiri saat ini menjadi pulau yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia yang mencapai 154 kabupaten/kota, di mana jumlah kabupaten/kota di Pulau Sumatera sendiri jauh mengungguli jumlah kabupaten/kota di pulau lainnya yang ada di Indonesia. Adapun jumlah kabupaten/kota yang ada di beberapa Pulau di Indonesia adalah seperti pada tabel yang ditampilkan berikut ini (Oktaviani dan Nailufar, 2023):

Tabel 1.1
Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia

Pulau	Provinsi	Jumlah		Jumlah Kabupaten/Kota
		Kabupaten	Kota	
Sumatera	10	120	34	154
Jawa	7	90	35	125
Nusa Tenggara	2	29	3	32
Kalimantan	5	47	9	56
Sulawesi	6	71	17	88
Maluku	2	17	4	21
Papua	2	40	2	42

Sumber: Kompas.com (2023)

Berdasarkan jumlah kabupaten/kota di Indonesia pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi serta memiliki sebanyak 154 kabupaten/kota yang masing-masing terdiri dari 120 kabupaten dan terdapat sebanyak 34 kota. Kemudian, Pulau Jawa sendiri memiliki total sebanyak 7 provinsi yang terdiri dari 90 kabupaten dan 35 kota, selanjutnya Pulau Sulawesi yang memiliki 6 provinsi dan 88 kabupaten/kota, Pulau Kalimantan yang terdiri dari 5 provinsi serta 56 kabupaten/kota, kemudian Pulau Papua yang memiliki 2 provinsi serta 42 kabupaten/kota, Pulau Nusa Tenggara yang memiliki 2 provinsi serta 32 kabupaten/kota, serta Pulau Maluku yang memiliki 2 provinsi dan memiliki 21 kabupaten/kota. Sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk melihat bagaimana kondisi keuangan dari setiap pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, di mana penulis memperoleh hasil seperti pada tabel berikut:

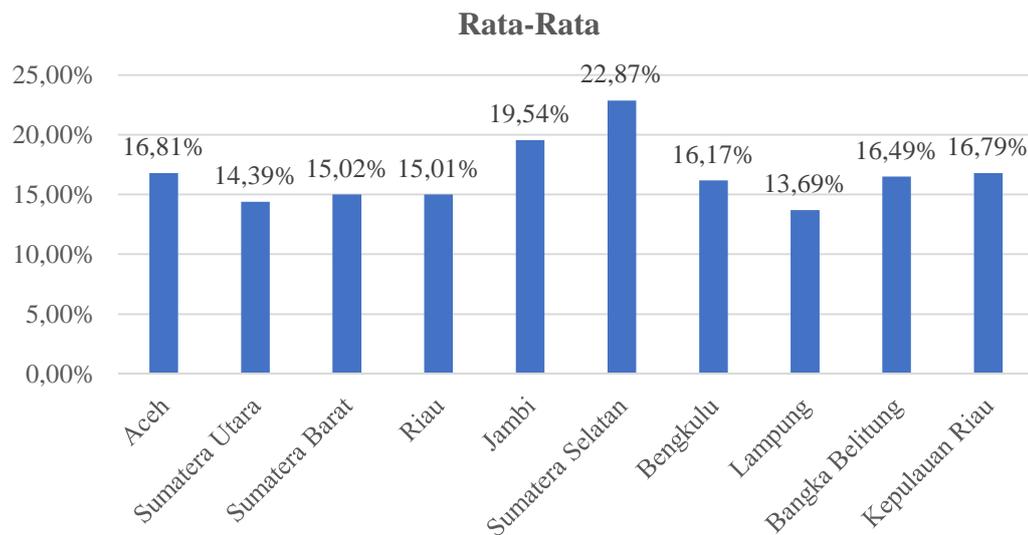
Tabel 1.2
Kondisi *Financial Distress* Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2020-2021

No	Provinsi	Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	<i>Financial Distres</i>
1	Aceh	2020	Rp 1.755.472.079.286	Rp 13.242.212.801.894	13,26%
		2021	Rp 2.199.333.370.929	Rp 13.683.582.127.432	16,07%
2	Sumatera Utara	2020	Rp 1.497.944.969.133	Rp 12.653.607.434.218	11,84%
		2021	Rp 1.141.203.699.702	Rp 13.225.393.166.670	8,63%
3	Sumatera Barat	2020	Rp 736.888.360.714	Rp 6.408.293.788.337	11,50%
		2021	Rp 666.352.120.893	Rp 6.468.906.658.345	10,30%
4	Riau	2020	Rp 919.245.593.570	Rp 8.172.706.474.595	11,25%
		2021	Rp 1.018.455.078.253	Rp 8.931.704.166.450	11,40%
5	Jambi	2020	Rp 642.695.707.788	Rp 4.430.392.750.898	14,51%
		2021	Rp 449.690.683.606	Rp 4.388.299.688.277	10,25%
6	Sumatera Selatan	2020	Rp 1.664.700.767.363	Rp 9.517.763.493.965	17,49%
		2021	Rp 1.836.834.114.021	Rp 10.060.730.260.978	18,26%
7	Bengkulu	2020	Rp 417.095.645.164	Rp 2.698.458.077.971	15,46%
		2021	Rp 324.342.084.410	Rp 2.880.225.046.730	11,26%
8	Lampung	2020	Rp 752.528.210.219	Rp 6.967.358.448.182	10,80%
		2021	Rp 849.692.114.832	Rp 7.097.651.401.591	11,97%
9	Bangka Belitung	2020	Rp 436.502.107.450	Rp 2.575.170.436.359	16,95%
		2021	Rp 428.654.245.651	Rp 2.465.813.370.118	17,38%
10	Kepulauan Riau	2020	Rp 586.608.798.242	Rp 3.855.203.051.882	15,22%
		2021	Rp 338.332.248.969	Rp 3.703.816.067.350	9,13%

Sumber: DJPK Kemenkeu (2023)

Berdasarkan data observasi awal yang penulis peroleh, di mana kesepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera selama tahun 2020-2021 berada dalam kondisi *financial distress*. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, di mana porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat belanja modal tersebut dapat dinyatakan dalam status *financial distress* atau ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Bahkan, dalam 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021, semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera diproyeksi rata-rata mengalami *financial distress*. Adapun datanya seperti pada gambar berikut:



Sumber: DJPK Kemenkeu (2023)

Gambar 1.1 Rata-Rata Kondisi *Financial Distress*

Berdasarkan rata-rata kondisi *financial distress* dari kesepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada gambar di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021, di mana ke sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera diproyeksikan mengalami masalah atau kondisi *financial distress*. Hal ini dikarenakan tingkat alokasi dana yang dilakukan oleh ke sepuluh provinsi tersebut masih belum mencapai 30% seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, di mana porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30% dari total alokasi belanja daerah yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Tidak hanya tingkat provinsi saja, kondisi *financial distress* juga terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera, di mana berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, di mana penulis memperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Kondisi *Financial Distress* Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

No	Kabupaten	Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase
1	Kabupaten Aceh Barat	2019	Rp 263.510.000.000	Rp 1.366.760.000.000	19,28%
		2020	Rp 271.980.000.000	Rp 1.330.250.000.000	20,45%
		2021	Rp 289.190.000.000	Rp 1.343.670.000.000	21,52%
2	Kabupaten Aceh Besar	2019	Rp 285.170.000.000	Rp 1.841.600.000.000	15,48%
		2020	Rp 277.250.000.000	Rp 1.910.390.000.000	14,51%
		2021	Rp 215.170.000.000	Rp 1.891.450.000.000	11,38%
3	Kabupaten Asahan	2019	Rp 304.478.575.305	Rp 1.775.230.082.118	17,15%
		2020	Rp 146.983.023.065	Rp 1.603.180.726.931	9,17%
		2021	Rp 192.281.525.138	Rp 1.592.769.001.954	12,07%
4	Kabupaten Dairi	2019	Rp 197.567.865.963	Rp 1.131.108.532.277	17,47%
		2020	Rp 139.598.777.989	Rp 1.058.398.984.996	13,19%
		2021	Rp 177.886.901.012	Rp 1.133.737.127.633	15,69%
5	Kabupaten Limapuluh Kota	2019	Rp 252.910.521.752	Rp 1.362.116.350.432	18,57%
		2020	Rp 152.712.089.645	Rp 1.217.117.589.785	12,55%
		2021	Rp 147.622.625.105	Rp 1.266.371.638.223	11,66%
6	Kabupaten Agam	2019	Rp 280.827.672.997	Rp 1.507.715.255.642	18,63%
		2020	Rp 135.090.687.654	Rp 1.354.150.129.482	9,98%
		2021	Rp 142.409.062.383	Rp 1.368.645.115.805	10,41%
7	Kabupaten Bengkalis	2019	Rp 1.108.175.580.895	Rp 3.757.848.253.758	29,49%
		2020	Rp 500.329.662.983	Rp 2.988.472.251.554	16,74%
		2021	Rp 679.492.555.913	Rp 3.292.960.813.197	20,63%
8	Kabupaten Indragiri Hilir	2019	Rp 257.568.468.821	Rp 1.983.886.222.422	12,98%
		2020	Rp 264.520.277.990	Rp 1.963.650.199.840	13,47%
		2021	Rp 182.879.144.563	Rp 1.876.090.594.229	9,75%
9	Kabupaten Batanghari	2019	Rp 251.118.803.753	Rp 1.341.856.186.751	18,71%
		2020	Rp 150.464.273.242	Rp 1.196.945.496.534	12,57%
		2021	Rp 177.304.084.037	Rp 1.253.599.608.461	14,14%
10	Kabupaten Bungo	2019	Rp 234.629.991.487	Rp 1.386.881.390.096	16,92%
		2020	Rp 153.987.416.404	Rp 1.294.680.573.589	11,89%
		2021	Rp 103.295.154.352	Rp 1.155.170.164.478	8,94%

Sumber: DJPK Kemenkeu (2023)

Berdasarkan data kondisi *financial distress* Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada Tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota

tersebut memiliki belanja modal kurang dari 30% dari total belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota yang penulis jadikan sebagai observasi awal dalam kondisi *financial distress*. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, di mana porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat belanja modal tersebut dapat dinyatakan dalam status *financial distress* atau ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Pradana dan Sarjiyanto (2023) dan penelitian Shiddiqy et al. (2022) serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Elfiyana dan Arza (2022) di mana mereka tidak menggunakan beberapa variabel seperti luas wilayah, dan *budgetary solvency ratio*. Kemudian penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh Pinasti dan Poerwati (2022) dan penelitian Illahi et al. (2021) yang tidak menggunakan rasio efisiensi, kemandirian keuangan, dan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, di mana dapat dilihat bahwa dari 10 provinsi yang penulis lakukan observasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, di mana ke sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masih memiliki alokasi belanja modal yang kurang dari 30% yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa ke sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera tersebut berada dalam kondisi *financial distress*. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kondisi Kondisi *Financial Distress* (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Pulau Sumatera)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio efektivitas berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera?
2. Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera?
3. Apakah rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera?
4. Apakah *budgetary solvency ratio* berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera?
5. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera?
6. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera?

7. Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera?
8. Apakah derajat desentralisasi berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah rasio efektivitas berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.
2. Untuk menguji apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.
3. Untuk menguji apakah rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.
4. Untuk menguji apakah *budgetary solvency ratio* berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.
5. Untuk menguji apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.
6. Untuk menguji apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.

7. Untuk menguji luas wilayah berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.
8. Untuk menguji apakah derajat desentralisasi berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian di atas. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin memahami, mendalami, dan menambah wawasan mengenai manajemen khususnya dalam manajemen keuangan daerah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, bagi peneliti sendiri, dan bagi pihak fakultas.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan manajemen keuangan daerah.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah didapat mengenai manajemen khususnya manajemen keuangan daerah.